

PENERAPAN BIROKRASI WIRAUSAHA
(Studi Kasus Pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Oleh : Winarsih

Dibimbing Oleh : Teguh Kismantoroedji dan Siti Hamidah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan (1) birokrasi wirausaha dengan prinsip pemerintah berorientasi misi; (2) birokrasi wirausaha dengan prinsip pemerintah wirausaha; (3) birokrasi wirausaha dengan prinsip pemerintah antisipatif; (4) birokrasi wirausaha dengan prinsip pemerintah desentralisasi di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pelaksanaan penelitian menggunakan studi kasus. Metode pengambilan informan menggunakan *Purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) prinsip pemerintah berorientasi misi di bidang kayu jati kegiatan yang dilakukan adalah tebang pilih kayu jati, bidang minyak kayu putih penyusunan rencana teknis tahunan, bidang jasa lingkungan dan ekowisata melakukan kerjasama dengan Koperasi Notowono untuk mengelola Wisata Hutan Pinus Mangunan. (2) prinsip pemerintah wirausaha dengan mengelola hasil hutan kayu jati dan minyak kayu putih yang dijual dengan sistem lelang, jasa lingkungan dan ekowisata melakukan kerjasama dengan Koperasi Notowono untuk mengelola Wisata Hutan Pinus Mangunan. (3) prinsip pemerintah antisipatif adalah dengan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di tingkat BDH, RPH dan masyarakat sekitar hutan. (4) prinsip pemerintah desentralisasi adalah BDH dan RPH diberikan wewenang penuh untuk mengambil keputusan terkait pengelolaan hasil hutan.

Kata kunci : birokrasi wirausaha, pemerintah berorientasi misi, pemerintah wirausaha, pemerintah antisipatif, pemerintah desentralisasi.

**THE IMPLEMENTATION OF ENTREPRENEURIAL BUREAUCRACY
(A Case Study on Center for Forest Management Units (BKPH), Special
Region of Yogyakarta)**

By: Winarsih

Supervised by: Teguh Kismantoroaji and Siti Hamidah

ABSTRACT

The present aimed to describe the implementation of: (1) entrepreneurial bureaucracy with mission-oriented government principle; (2) entrepreneurial bureaucracy with self-employment government principle; (3) entrepreneurial bureaucracy with anticipatory government principle; (4) entrepreneurial bureaucracy with decentralized government principle in the Central for Forest Management Units (BKPH), Special Region of Yogyakarta. The research method used case study. The informant collection method used purposive sampling. The data collection technique used interviews, observations and documentations. The data validity employed triangulation of data collection technique. The results show that: (1) the mission-oriented government principle in teak sector is to do teak's selective logging. In eucalyptus sector, the activities done are annual technical planning, environmental services and ecotourism through cooperation with Notowono Cooperative for managing Mangunan Pine Forest Tour; (2) the government's entrepreneurial principle is to manage teak forests' products and eucalyptus oil sold under an auction system for environmental and ecotourism services, in cooperation with Notowono Cooperative for managing Mangunan Pine Forest Tour; (3) the anticipatory government principle is to conduct direction, supervision and control at the level of BDH, RPH and forest communities; (4) the decentralized government principle is BDH and RPH are given with full authority to make decisions regarding forest products management.

Keywords : Entrepreneurial bureaucracy, mission-oriented government, entrepreneurial government, anticipatory government, decentralized government.